

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu) sebagaimana amanat pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Titik Triwulan Tutik<sup>1</sup> menyatakan Pemilu sebagai alat dalam menjalankan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada prinsipnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Senada dengan pendapat tersebut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim<sup>2</sup>, juga mengatakan Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 331-332

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI. hal 329

Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Selanjutnya bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat tujuan utama yakni :1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2) pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elite penguasa; dan 4) pendidikan politik.<sup>3</sup>

Partai politik mempunyai peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional di Indonesia. Secara umum Partai Politik dapat dikatakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945<sup>4</sup>. Sehubungan dengan definisi diatas, Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, Op Cit. hal 333

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 162.

Pun juga E.E Schattscheider menyatakan “*modern democracy in unthinkable save in term of political party*”. Partai politik adalah jantung dari demokrasi perwakilan, melalui partai politiklah sirkulasi elite dan kepemimpinan politik sebuah negara berjalan. Baik buruknya demokrasi salah satunya terletak pada kualitas partai politik. karenanya memperbaiki demokrasi, tanpa menyentuh pembaharuan partai politik dan sistem kepartaian adalah pembaharuan yang tak esensial.<sup>6</sup> Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.

Proses ini secara langsung melibatkan keaktifan organisasi pekerja partai atau mesin politik partai untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam agenda pemenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, partai politik juga dapat memobilisasi konstituennya untuk terlibat langsung dalam kampanye serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses demokratisasi di negara yang sedang berkembang dan belajar berdemokrasi ini di tengah-tengah tantangan global yang kian kompetitif.

---

<sup>6</sup> Rifqinizamy Karsayuda, 2015, *Partai Politik Lokal untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik Lokal di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan*, (Rajagrafindo Persada, Depok) hal. 101

Pentingnya peranan partai politik ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu.<sup>7</sup> Uang mempengaruhi kompetisi politik bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa.<sup>8</sup> Dalam hal keuangan Partai Politik bersumber dari:<sup>9</sup> a) iuran anggota; b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Iuran anggota merupakan sumbangan sukarela dari para anggota partai politik ataupun dari para kader partai politik yang tengah duduk di kursi lembaga legislatif maupun eksekutif, namun dalam prakteknya, belum ada satupun partai politik yang berhasil mengumpulkan iuran

---

<sup>7</sup> Veri Junaidi, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hal 1

<sup>8</sup> Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh, 2009, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), hal 314.

<sup>9</sup> Lihat pasal 34 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

anggotanya. Kebanyakan dana tersebut datang dari penyumbang baik itu dari perseorangan ataupun badan usaha.<sup>10</sup> Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri isu keuangan partai politik kurang menjadi ketentuan yang diatur dengan jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan partai politik sampai saat ini relatif tidak ada yang berubah. Perubahan hanya terjadi pada besaran sumbangan yang dapat diberikan kepada partai politik. Sebelumnya untuk dana bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR Rp 108, kini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bahwa saat ini besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di

---

<sup>10</sup> Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Yayasan Perludem. Hal v

<sup>11</sup> Ibid, hal v-vi

DPR sebesar Rp. 1000/suara sah<sup>12</sup>, besaran nilai bantuan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1200/suara sah<sup>13</sup>, dan besaran nilai bantuan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1500/suara sah<sup>14</sup>. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat serta digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.<sup>15</sup>

Pola pengeluaran tidak mencerminkan fungsi parpol. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk membiayai dua kegiatan berikut: pertemuan lima tahunan (kongres, Munas, Muktamar) dan tahunan, proses pencalonan dan kampanye pemilu. Selain kedua kegiatan utama tersebut, jenis pengeluaran lainnya adalah kegiatan pendidikan politik (peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa), dan kegiatan operasional kesekretariat, kegiatan rekrutmen, kaderisasi, dan representasi politik hampir tidak ada atau menempati porsi yang sangat kecil dalam arti waktu maupun anggaran.<sup>16</sup>

Penerimaan bantuan partai politik dalam rangka mempertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

<sup>13</sup> Ibid, pasal 5 ayat 3

<sup>14</sup> Ibid, pasal 5 ayat 5

<sup>15</sup> Ibid, pasal 16

<sup>16</sup> Hifzil Alim, 2014, *Pemilihan Umum Serentak*, (Rajagrafindo Persada, Depok) hal 634

APBN/APBD maka setiap partai politik wajib untuk memberikan laporannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa, jika terdapat partai politik yang tidak memberikan laporan pertanggungjawabannya maka partai politik tersebut dapat diberikan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan.

Persoalan yang mendasar dari keuangan partai politik adalah rendahnya transparansi, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik oleh internal partai politik itu sendiri. Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2012 dalam studi keuangan partai politik di tingkat nasional dan beberapa daerah, menunjukkan bahwa persoalan mendasar di kelembagaan partai politik adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas partai politik, khususnya pada pengelolaan keuangannya.<sup>17</sup>

Tercatat pada tahun 2017 hanya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mencantumkan audit laporan partai politik.<sup>18</sup> ICW mengatakan meskipun laporan keuangan partai politik yang bersumber dari negara sudah secara patuh dilaporkan oleh partai politik kepada BPK, Namun laporan keuangan di luar itu tak dilaporkan. Audit tak dilakukan oleh BPK melainkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk partai politik.

---

<sup>17</sup> Rini Friastuti dalam Hukum Online, 2012, *ICW: Banyak Partai politik Tak Punya Laporan Keuangan*, URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5051ce0a04745/icw--banyak-partai-politik-tak-punya-laporan-keuangan>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>18</sup> Faiq Hidayat dalam Detik, 2017, *ICW: Hanya Gerindra yang Laporkan Penggunaan Dana Partai politik 2017*, URL: <https://news.detik.com/berita/3585322/icw-hanya-gerindra-yang-laporkan-penggunaan-dana-partai-politik-2017>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018

Soal pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta transparansi pengelolaan dana, partai politik masih tergolong buruk.<sup>19</sup>

Bahkan dari hasil evaluasi pemilu 2014 yang di laporkan oleh portal rumah pemilu menyatakan bahwa salah satu isu yang di rekomendasikan untuk di perbaiki pada pemilu 2019 ialah soal aturan dan dana kampanye.<sup>20</sup> Masalah selajutnya *pertama*, penerimaan partai politik yang masih bermasalah antara lain : 1) terdapat data penyumbang yang identitasnya fiktif, baik karena nama penyumbang maupun alamat penyumbang tidak bisa di konfirmasi sama sekali; 2) adanya data penyumbang, baik individu maupun badan usaha yang dari total sumbangan maksimal yang di perbolehkan undang-undang diketahui melebihi jumlah sumbangan.

Modus yang digunakan adalah dengan memecah besaran sumbangan ke berbagai pihak. *Kedua*, masalah pengeluaran dana partai politik yakni: 1) ketidak jelasanya penggunaan dana kampanye. Padahal penggunaan anggaran partai politik seharusnya secara transparan diketahui publik agar diketahui kemana dana yang diperoleh mengalir dan sebaliknya; 2) pola pengeluaran tidak mencerminkan fungsi partai politik. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk membiayai dua kegiatan berikut: pertemuan lima tahunan (kongres, Munas, Muktamar) dan tahunan, proses pencalonan dan kampanye pemilu. Selain kedua kegiatan utama

---

<sup>19</sup> Nabilla Tashandra dalam Kompas, 2017, *ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Partai politik Masih Buruk*, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/13521781/icw-transparansi-pengelolaan-anggaran-partai-politik-masih-buruk>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>20</sup> Rumah Pemilu, 2014, *Pemilu 2014 di Indonesia (Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu)*, RumahPemilu.org, Jakarta, hal. 62



tersebut, jenis pengeluaran lainnya adalah kegiatan pendidikan politik (peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemadirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa), dan kegiatan operasional kesekretariat, kegiatan rekrutmen, kaderisasi, dan representasi politik hampir tidak ada atau menempati porsi yang sangat kecil dalam arti waktu maupun anggaran.<sup>21</sup>

Pengendalian keuangan partai politik tidak hanya berupa pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan dengan adanya regulasi saja tidak akan mampu mengendalikan perilaku menyimpang partai politik dalam hal dana. Hal ini tidak lain karena partai politik secara nyata memerlukan dana yang cukup besar, tetapi partai tidak memiliki sumber penerimaan yang memadai. Hal ini sangat terlihat dengan upaya partai berlomba-lomba menumpuk pundi-pundi uang untuk menjalankan roda organisasi partai.

Pengurus partai dan pejabat publik dari partai menggunakan berbagai manuver untuk membawa pundi-pundi uang ke partai politik. Tata cara praktek penggalangan dana yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik.<sup>22</sup> Meskipun melalui pasal 38 UU Partai Politik yang menyatakan Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik

---

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2011, *Buku 10: Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Kemitraan, Jakarta) hal. 1

<sup>22</sup> Veri Junaidi, Op Cit, hal iii-iv

terbuka untuk diketahui masyarakat. Namun dalam implementasinya partai politik masih cenderung tertutup dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangannya.

Penegakan ketentuan tentang keuangan parpol sangat lemah baik karena ketentuan yang mengatur keuangan parpol masih mengandung banyak kekosongan hukum maupun karena tidak ada institusi yang diberi kewenangan menegakkan ketentuan tersebut. Kekosongan hukum ini tidak hanya karena belum diatur tetapi juga sudah diatur namun tanpa sanksi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya diberikan kewenangan membuat Peraturan Pelaksana tentang Dana Kampanye, menetapkan KAP untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat umum, serta menengakkan sanksi administratif berdasarkan putusan pengadilan.

Akan tetapi KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik dugaan adanya pelanggaran ketentuan dana kampanye, dan tidak memiliki kewenangan menegakkan sanksi.<sup>23</sup> Kemudian masalah audit dana kampanye misalnya soal independensi dan profesionalitas KAP yang akan melakukan audit keuangan parpol, masalah lainya tindak lanjut temuan audit yang tidak jelas misalkan terdapat penyimpangan hasil audit. Berbagai hal yang di uraikan diatas merupakan masalah yang berlarut-larut terjadi dan belum ditemukan solusinya. Oleh karena tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi keuangan partai politik. Sejauh ini peran Bawaslu dalam

---

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Op Cit., hal 2

mengawasi Parpol hanya terbatas ketika parpol tersebut ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Agar pengawasan, pengendalian keuangan partai politik dapat ditegakkan secara konsisten. Konkritnya, penyusunan dan penegakan ketentuan keuangan partai politik di bidang pemilu bisa terintegrasi dengan baik, maka akan di rekomendasikan untuk menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang dapat mengawasi dan menegakkan keuangan parpol. Hal ini didasarkan atas kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan serta meminimalisir terjadinya praktik politik uang.<sup>24</sup> Selain itu dengan penambahan kewenangan ini diharapkan akan tercipta kanal-kanal model penegakan hukum pemilu baik dari aspek pelanggaran pemilu (pelanggaran pidana, administratif, dan keuangan partai politik) dan sengketa proses pemilu. Sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya terbatas ketika parpol tersebut ditetapkan sebagai peserta pemilu, melainkan selama parpol tersebut kedudukannya masih berlaku sebagai parpol, maka Bawaslu dapat mengawasi setiap keuangan parpol.

Mengingat kedudukan Bawaslu pasca adanya UU Pemilu, mengamanatkan kelembagaan Bawaslu bersifat permanen dan mandiri. Selain itu, UU Pemilu juga memperluas tugas, wewenang baru bagi Bawaslu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil, bersih dan demokratis. hal ini dilakukan untuk memastikan hadirnya

---

<sup>24</sup> Lihat pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

demokrasi di Indonesia yang berintegritas. Adapun judul yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah **“REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN KEUANGAN PARTAI POLITIK GUNA MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah yang difokuskan sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil?
2. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji urgensinya perlunya memperluas kewenangan bawaslu dalam pengawasan keuangan partai politik dalam mewujudkan pemilu jujur dan adil.

- b. Untuk menemukan rekonstruksi yang ideal terhadap perluasan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan keuangan partai politik dalam mewujudkan pemilu jujur dan adil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait konsep pengawasan keuangan partai politik, memahami tugas dan fungsi Bawaslu serta formulasi yang tepat terhadap perluasan terhadap perluasan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan keuangan partai politik. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

##### **b. Bagi Mahasiswa**

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai konsep pengawasan keuangan partai politik, memahami tugas dan fungsi Bawaslu serta formulasi yang tepat terhadap perluasan terhadap perluasan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan keuangan partai politik.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait dengan konsep perluasan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan keuangan partai politik.

#### **d. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka menata kembali penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pengawasan terhadap keuangan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait Pengawasan Keuangan Partai Politik dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter

Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

## **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>26</sup> Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) akan mencakup 2 hal yaitu metode pembentukan hukum dan metode

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hal. 35.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112

penafsiran hukum. Jan Gijssels dan Marck van Hoeve mengemukakan tentang *metodesleer van het recht* atau ajaran-ajaran tentang metode hukum, yang termasuk dalam kawasan teori hukum dan pada dasarnya dibedakan antara metode-metode pembentukan hukum (*metodes van de rechtsvorming*) dan metode-metode penerapan hukum (*metodes van de rechtstoepassing*).<sup>27</sup> Dalam pengertian pertama dikemukakan seperti teknik perundang-undangan (*wetgevingstechniek*), sedangkan yang kedua menyangkut metode-metode penafsiran undang-undang.<sup>28</sup> Dari metode penafsiran perundang-undangan diharapkan nantinya memperoleh gambaran konsep hukum mengenai prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berhubungan pengawasan keuangan partai politik.

Adapun langkah yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah: (i) mengadakan inventarisasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan partai politik di Indonesia; (ii) melakukan kategorisasi terhadap perundang-undangan tersebut; dan (iii) melakukan analisis terhadap perundang-undangan. Dengan melakukan analisis, akan diperoleh hasil berupa penemuan prinsip-prinsip dan aturan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op Cit., Hal 93

<sup>28</sup> Ibid



hukum keuangan partai politik dan diketahui konsistensi dan harmonisasi antara perundang-undangan tersebut.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

#### **c. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal.<sup>30</sup> Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum dengan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana, Hal. 177

<sup>30</sup> Ibid, hal 172

melakukan perbandingan negara Inggris, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum<sup>31</sup> yaitu :

a. Sumber Bahan Primer dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hirarki, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .

b. Sumber bahan sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui

---

<sup>31</sup> Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal. 268-269.

maupun mengenai suatu gagasan (*idea*). Bahan sekunder ini mencakup:<sup>32</sup> buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,<sup>33</sup> yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

---

51. <sup>32</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

<sup>33</sup> Jhony Ibrahim, Op Cit, hal 392

#### 4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>34</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penulisan. Kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata 2013, *Metode Penelitian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 73

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis, yakni Pengawasan Pemilu, Teori Pengawasan, Teori Wewenang, Partai Politik, Keuangan Partai Politik, dan Bawaslu.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil dan Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum.